**PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(Studi Kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT, Talak secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia digunakan dalam syariah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan.¹

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh pihak suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh pihak isteri) harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan adanya alasan yang jelas.

Suatu perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum dan oleh karenanya tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu hukum menganggapnya tidak pernah ada (*never existed*). Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si suami maupun si istri.

Bagi sebagian umat Islam Indonesia prosedur yang mengatur mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan

¹Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996), h. 80.

dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fikih. Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.²

Perbedaan prosedur talak yang terdapat dalam fikih dan KHI ini menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, ketentuan tersebut sulit diterima oleh sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya daerah yang belum seluruhnya mengindahkan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini, ada sebagian masyarakat yang masih tunduk hanya kepada hukum agama saja serta masih ada masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan, hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Sedayulawas yang notabennya adalah masyarakat yang masih awam serta memiliki ketaatan yang tinggi pada aturan yang dibuat agama.

Kegelisahan akademik yang muncul dari persoalan tersebut yang mengantarkan penelitian ini dilakukan adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penjatuhan talak di luar Pengadilan Agama dan apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Talak dalam Islam

Talak, dari kata “*Ithlâq*”, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dalam istilah agama, “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya

²Anshary, *Hukum Perkawina*, h. 82.

hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.³

Talak merupakan suatu perkara yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadits Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ >> أَبْعَضُ الْحَلَالِ

إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ << رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ.⁴

Dari Ibnu Umar R.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak” diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim.

Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.⁵ Dalam pandangan fikih perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan yakni urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.

Alasan yang dibenarkan untuk Menjatuhkan Talak

Menurut syariat Islam alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak ialah:⁶ (1) Istri berzina. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. (2) Istri nusyuz meskipun telah dinasehati berulang kali; atau Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. (3) Istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketantraman dan kerukunan rumah tangga.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2010), h. 55.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid II* (Mesir: Daar al-Fath lil I'lam al-'Araby, 2009), h. 155.

⁵ Anshary, *Hukum Perkawinan*, h. 82.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 29.

Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Bila hubungan perkawinan putus, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut : (1) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.⁷ (2) Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai suatu kompensasi.

Talak Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Materi-materi yang terdapat dalam perundang-undangan itu tertuang dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Pasal 39 UU Perkawinan, undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.⁸

Prosedur putusnya hubungan perkawinan menurut KHI

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, Pengadilan

⁷Amir, *Hukum Perkawinan*, h. 228.

⁸<http://fikihonline.blogspot.com/2010/04/pengembangan-makna-talak-dalam.html>. Diakses tanggal 7 Desember 2013.

Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh istri atau kuasanya. (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Putusnya hubungan perkawinan menurut KHI

Pasal 113 KHI dinyatakan Perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian salah satu pihak. (b) Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri. (c) Karena putusan Pengadilan.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁹ Karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan data-data. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.¹⁰ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: (a) Wawancara, Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

¹⁰Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131.

wawancara semi terstruktur yang menggunakan daftar pertanyaan yang tidak sesuai dengan pedoman umum namun sesuai dengan data yang peneliti butuhkan.¹¹ (b) Observasi, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi *Participant Observation* yaitu peneliti berpartisipasi langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yakni masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. (c) Dokumentasi, dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah mengecek kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban informan, memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan, memeriksa kembali data yang diperoleh dengan melihat data yang berasal langsung dari sumber yang dipercaya dengan data yang diambil dari pembanding atau pendukung, menguraikan masalah pemahaman masyarakat Desa Sedayulawas terhadap ikrar talak di luar Pengadilan Agama, dan terakhir membuat kesimpulan atau point-point penting yang kemudian menggambarkan gambaran secara jelas, ringkas dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Objektif Lokasi Penelitian¹²

Desa Sedayulawas terbagi atas 3 (tiga) dusun yaitu: Dusun Sedayulawas, Dusun Wedung, Dusun Ngesong dengan Luas Wilayah Desa Sedayulawas 1.063,783 Ha atau 10,64 km¹³. Desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Brondong dari 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan yang ada dengan posisi garis pantai dan terletak pada jarak

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 233.

¹²Profil Desa Sedayulawas Tahun 2013

0 km dari Ibukota Kecamatan Brondong dan berjumlah 16.316 jiwa, (7.841 jiwa berjenis kelamin laki-laki, 8.475 jiwa berjenis kelamin perempuan) yang tersebar di tiga pedukuhan terdiri dari 3.809 Kepala Keluarga (KK).

Dari segi sosial keagamaan, masyarakat Desa Sedayulawas tergolong sebagai desa yang islami dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, pada desa ini terdapat beberapa sarana ibadah antara lain Masjid 8 buah, Musholla 46 buah. Dari kondisi sosial ekonomi, sebagian besar masyarakat desa Sedayulawas bermata pencaharian sebagai petani dengan mengelola tanah sawah dan ladang yang ada.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Penjatuhan Talak Di Luar Pengadilan Agama

Masyarakat Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan memiliki pemahaman yang beragam dalam memahami talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan dan sosial sehingga sangat berpengaruh pada pemikiran mereka. Setelah peneliti meneliti langsung kepada beberapa masyarakat yang ada di desa Sedayulawas, peneliti melihat bahwa masyarakat memiliki pendapat masing-masing juga alasan dan dasar mereka mendapatkan pemahaman tersebut.

Menurut informan yang ditemui talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tersebut memang sudah sah menurut agama namun menurut peraturan yang berlaku sekarang pelaku yang bercerai tetap harus mengurus perkara perceraian mereka ke Pengadilan karena dengan ke pengadilan status perceraian mereka akan sah dan memperoleh kekuatan hukum tetap dari Negara dengan begitu pelaku perceraian juga akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Terdapat beberapa informan yang telah mengetahui jika perceraian harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama tetapi informan tersebut lebih memilih untuk ikut aturan agama saja dari pada harus patuh pada aturan yang dibuat Negara.

Setelah mendengarkan jawaban dari pelaku yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama, dapat diketahui bahwasannya pemahaman sebagian masyarakat desa Sedayulawas Kecamatan Brondong menganggap sah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama karena mereka berpedoman pada aturan fikih. Namun ada juga sebagian dari masyarakat yang menganggap perceraian tersebut tidak sah dan harus melakukan perceraian di pengadilan agama.

Adanya pasangan suami istri yang lebih memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan ini karena kurangnya tingkat pendidikan formal maupun non formal yang mereka tempuh. Sehingga menyebabkan mereka kurang memahami dan sadar akan pentingnya melakukan perceraian di pengadilan agama.

Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Talak Di Luar Pengadilan Agama

Dalam hal ini banyak faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama. Berdasarkan temuan di lapangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan talak di luar pengadilan agama, antara lain: (1) Pemahaman masyarakat terhadap talak masih fikih *orientied*. Seperti yang kita ketahui bahwasannya masyarakat desa Sedayulawas merupakan masyarakat yang Islami dan mementingkan hal-hal yang bersifat keagamaan sehingga dalam hal talak pun ada sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk patuh terhadap peraturan yang ada di dalam aturan fikih saja dari pada harus mengikuti peraturan yang telah dibuat pemerintah. (2) Masyarakat tidak menganggap efektif peraturan yang ada. Karena hal tersebut membutuhkan waktu sementara jarak dengan pengadilan jauh dan mereka berasumsi tidak pernah sekali sidang selesai sehingga membutuhkan waktu yang lama. Salah satu yang menyebabkan pelaku memilih untuk melakukan perceraian di luar pengadilan agama adalah karena pelaku tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus perkara ke pengadilan. (3) Penghasilan pelaku yang dirasa tidak cukup untuk membayar biaya persidangan. Sebagian besar masyarakat desa Sedayulawas bermata pencaharian sebagai petani.

Antara hasil dari bertani dengan besarnya biaya persidangan dirasa tidak cukup untuk membayar biaya persidangan yang mereka anggap cukup besar. (4) Karena melakukan nikah sirri. Faktor yang menyebabkan salah satu informan melakukan perceraian di luar pengadilan agama adalah karena beliau mengaku dulunya memang mereka menikah secara sirri sehingga perceraian merekapun dilakukan di luar Pengadilan Agama. (5) Merasa sudah tidak cocok antara satu sama lain sehingga mengabaikan peraturan yang harus dijalankan. Salah satu alasan menarik yang menyebabkan pelaku melakukan perceraian di luar pengadilan agama salah satunya adalah karena adanya masalah yang menyebabkan ketidakcocokan antara satu sama lain yakni perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak sehingga para pihak mengabaikan peraturan yang seharusnya dijalankan.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data tentang pemahaman masyarakat terhadap ikrar talak di luar pengadilan agama di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dari informan yang ditemui didapat data bahwa sebagian dari masyarakat memahami bahwa talak di luar Pengadilan Agama adalah sah karena pemahaman mereka terhadap peraturan yang ada dalam fikih munakahat lebih dominan dimana fikih menyebutkan bahwa talak dinyatakan jatuh kapan saja dan di mana saja, hal ini berarti tidak harus di hadapan sidang pengadilan agama. Mereka beranggapan bahwasannya peraturan yang menyebutkan bahwa talak harus di depan sidang pengadilan agama hanya sekedar keperluan administratif saja. Sekalipun sebagian dari informan ada yang beranggapan sebaiknya talak dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama untuk mendapat pengakuan dari negara dan mempunyai kekuatan hukum (*legitimate*) serta berimplikasi pada perlindungan dan kepastian hukum. (2) Sebenarnya pelaku yang melakukan perceraian di luar pengadilan tersebut sudah mengetahui bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun karena beberapa faktor mereka lebih memilih

untuk melakukan perceraian di luar pengadilan agama, diantara faktor-faktor tersebut antara lain: (a) Pemahaman masyarakat terhadap talak masih fikih *orientied*. (b) Masyarakat tidak menganggap efektif peraturan yang ada. (c) Penghasilan pelaku yang dirasa tidak cukup untuk membayar biaya persidangan. (d) Karena melakukan nikah sirri. (f) Merasa sudah tidak cocok antara satu sama lain sehingga mengabaikan peraturan yang harus dijalankan.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut: (1) Bagi masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama untuk melakukan perceraian di hadapan pengadilan agama agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sehingga tidak terjadi dampak negatif yang tidak di inginkan nantinya. (2) Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pencatatan perkawinan dan perceraian. (3) Bagi pemerintah untuk membuat sanksi yang tegas untuk masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama hal ini diharapkan dapat meminimalisir jumlah masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan. (4) Bagi peneliti selanjutnya untuk mengambil nilai-nilai positif dari penelitian ini serta menyempurnakan hal-hal yang dinilai kurang dari penelitian ini.